

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022



LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS II PANGKALPINANG



DAFTAR ISI

	halaman
BAB I Pendahuluan	5
A. Latar Belakang	5
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
C. Maksud dan Tujuan.....	9
D. Aspek Strategis	9
E. Isu Strategis	16
F. Sistematika Laporan	17
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	18
A. Rencana Strategis	15
B. Perjanjian Kinerja	19
BAB III Akuntabilitas Kinerja	27
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Realisasi Anggaran	30
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	33
BAB IV PENUTUP	36
A. Kesimpulan	36
B. Saran	36
LAMPIRAN	
DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	
SURVEI IKM DESEMBER 2022	
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel I : Sasaran Program/Kegiatan Kinerja	12
Tabel II : Perjanjian Kinerja Tahun 2022	22
Tabel III : Capaian Kinerja Tahun 2022	25
Tabel IV : Realisasi Anggaran Tahun 2022	31
Tabel V : Capaian Kinerja Tahun 2021	44

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerah-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dapat tersusun dan diselesaikan tepat waktu, sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dipercayakan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2021.

Laporan Kinerja merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja Sekretariat Jenderal dalam rangka mewujudkan *good governance*. Penyusunan laporan kinerja didasari pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya

dan dituangkan pada perjanjian kinerja. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, efisiensi dan penghargaan Sekretariat Jenderal.

Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya hingga terselesaikannya laporan kinerja

ini dan tercapainya kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2021. Semoga LKIP Sekretariat Jenderal dapat bermanfaat guna peningkatan kualitas kinerja Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang semakin PASTI BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)

Kepala LPKA

Solihin, S.H.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP. Laporan Kinerja ini juga merupakan wujud kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II

Pangkalpinang dalam pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dijabarkan dalam RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Untuk mewujudkan Sasaran Program Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022 terdapat beberapa Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dan diharapkan dengan penetapan Indikator Kinerja tersebut, seluruh sasaran program dapat terlaksana dengan baik, terarah, dan terencana sehingga kinerja Sekretariat Jenderal semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) dan BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

LKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkal Pinang untuk membantu pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM 2020 – 2024.

Tujuan penyajian Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Hukum dan HAM atas kinerja yang telah dan dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkal Pinang untuk meningkatkan kinerjanya berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkal Pinang yang sesuai dalam penggunaan anggaran tahun 2020.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkal Pinang merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang harus selalu memastikan penerapan aspek – aspek perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling) dilaksanakan secara Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif sesuai dengan tata nilai Kementerian Hukum dan HAM yaitu “PASTI”.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015. yang dimaksud dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat

LPKA adalah Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA merupakan Unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. LPKA dipimpin oleh seorang Kepala.

Bahwa setiap yang berhadapan dengan hukum berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental dan spiritual. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengamanatkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum akan mendapatkan perlindungan khusus dan pelayanan pemasyarakatan sejak tahap pra-ajudikasi ajudikasi, sampai post-ajudikasi atau sejak proses penyidikan sampai proses pembinaan dan pembimbingan setelah menjalani pidana . Dengan demikian untuk menjamin perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) secara terpadu diperlukan suatu lembaga yang mengakomodir kebutuhan itu semua, khususnya di wilayah kerja kepulauan bangka belitung.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 18 Tahun 2015. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang menempati Lembaga Pemasyarakatan Pangkalpinang lama yang sebelumnya diperuntukan untuk kantor Rupbasan Kelas II Pangkalpinang, mulai dibangun pada tanggal 30 September 2016, mendapatkan belanja modal rehab gedung berdasarkan surat perjanjian kontrak Nomor W.7.PAS7-366-PL.02.01 Tahun 2016 Kantor Rupbasan Kelas II Pangkalpinang dibagi 2 (dua) fungsi sebagian untuk Kantor Rupbasan Kelas II Pangkalpinang sebagian untuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang resmi beroperasi dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : SEK-23.KP.03.03 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang pengangkatan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, dan mulai operasional pada tanggal 1 Maret Tahun 2017 dengan jumlah petugas 14 orang, dan pada Februari 2018 mendapatkan penambahan CPNS dengan jumlah 48 orang serta mempunyai daya tampung sekitar 50 penghuni/Anak Binaan.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 yang dimaksud dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. LPKA dipimpin oleh seorang Kepala.

1. Tugas

LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Anak Binaan Pemasyarakatan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, LPKA menyelenggarakan fungsi :

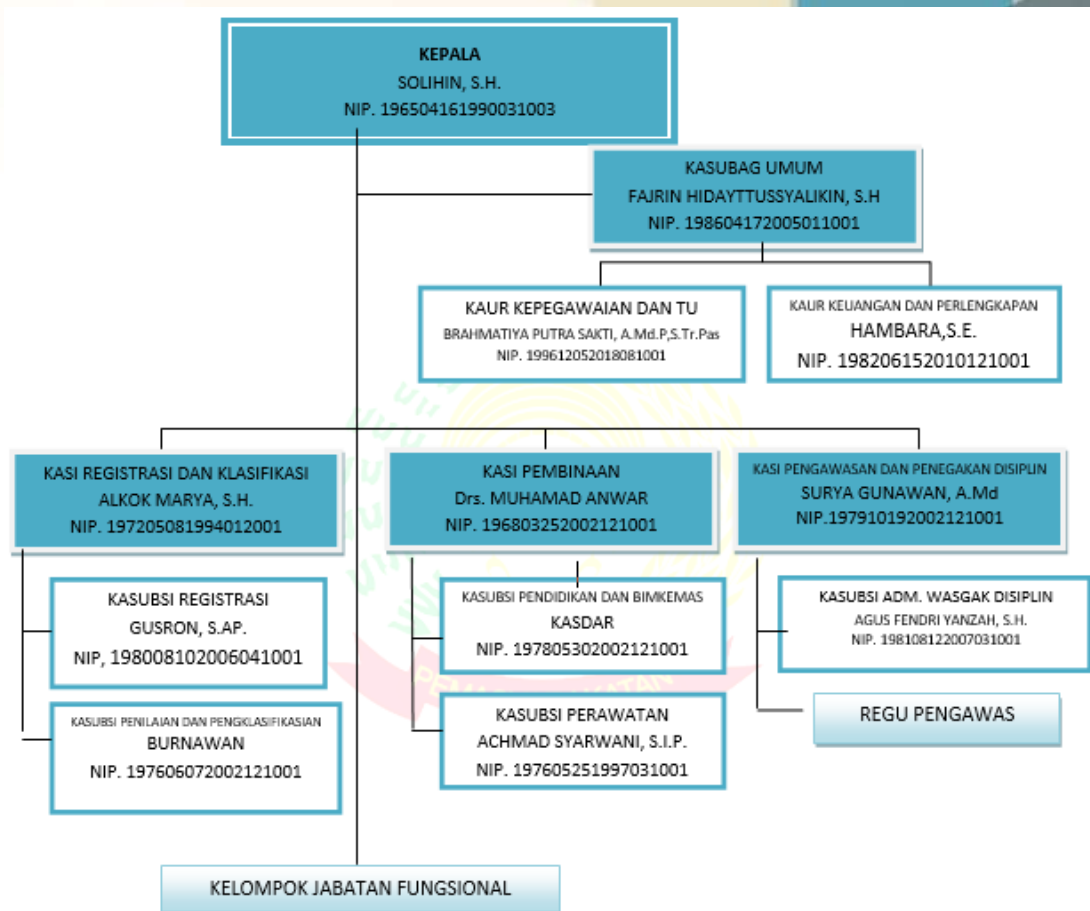
- a. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program;
- b. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi;
- c. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman, dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
- d. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
- e. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Letak Geografis

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 21 Pangkalpinang, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Barat	Kantor Polres Pangkalpinang
Timur	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III
Utara	Rumah Sakit Bhakti Timah
Selatan	Rumah Dinas Rupbasan Kelas II Pangkalpinang

Struktur Organisasi LPKA Kelas II Pangkal Pinang



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan LPKA Kelas II Pangkal Pinang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang yang terdiri :

a.	Jenis Kelamin	Total
	Laki – Laki	: 46 Orang
	Perempuan	: 14 Orang
	Total Sumber Daya Manusia	: 60 Orang

b.	Tingkat Pendidikan	Total
	SMA	: 43 Orang
	D3	: 03 Orang
	S1	: 14 Orang
	Total	: 60 Orang

C. Maksud dan Tujuan

Adapun penjabaran visi dan misi diatas disesuaikan dengan kedudukan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang sebagai berikut :

- a. Membentuk Anak Binaan menjadi manusia yang berguna, beriman, berilmu dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki kecenderungan hidup dan pandangan positif terhadap masa depan, sadar bahwa mereka sebagai generasi penerus bangsa;
- b. Mewujudkan keseimbangan, kemajuan Anak Binaan dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang berperan sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memulihkan kualitas hubungan anak dengan keluarga dan masyarakat melalui upaya reintegrasi sosial;
- d. Mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan, keadilan, non diskriminasi, dan penghargaan terhadap pendapat anak.
- e. Melaksanakan pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan, pembimbingan, dan pendampingan dalam tumbuh kembang anak;
- f. Meningkatkan ketakwaan, kecerdasan, kesantunan, dan keceriaan anak agar dapat menjadi manusia mandiri dan bertanggungjawab;

Menjadikan lembaga yang layak dan ramah anak, serta mempersiapkan Anak Binaan agar mempunyai kemampuan untuk berperan aktif dalam pembangunan setelah kembali lagi ke masyarakat.

D. Aspek Strategis

Dari beberapa Tujuan yang hendak dicapai, ditentukanlah Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM yang pengukurannya menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact*.

Ada beberapa sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2020-2024, antara lain :

- 1) Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- 2) Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
- 3) Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
- 4) Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Untuk mempermudah dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2020-2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM (Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang) yang Prima	Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
2	Memenuhi hak-hak warga binaan pemyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan.	Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase menurunnya residivis 2. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan
3	Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT

Dokumen Rencana Renstra Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Kementerian Hukum dan HAM. Rencana Kerja memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program. Rencana dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun neraca, prakiraan sasaran tahun berikutnya, alokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran serta cara pelaksanaannya.

Renja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang yang selanjutnya ditetapkan dalam Kontrak Kinerja. Adapun indikator yang ada dalam Perjanjian Kinerja diselaraskan dengan indikator yang ada di Dokumen Perencanaan Penganggaran / Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2021.

Pada Tahun 2022 dalam RKA K/L Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang mengemban Program “Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah” dengan anggaran sebesar **Rp. 808.686.000** (*delapan ratus delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) dan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan dengan anggaran sebesar **Rp. 4.374.748.000** (*empat miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah*)“.

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 808.686.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 4.374.748.000
Total	Rp. 5.183.434.000

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN KINERJA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG TAHUN 2022

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (SK)	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (ISK)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
SS 3 : Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit yang menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	1	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai standar	75 %	4.374.748.000
						2	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93 %	
						3	Persentase Tahanan/Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96 %	
						4	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70 %	
						5	Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80 %	
						6	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang	80 %	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (SK)	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (ISK)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
							mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		
						7	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV/AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70 %	
						8	Persentase perubahan kualitas hidup pencandu/penyalahgunaan /korban penyalahgunaan narkotika	25 %	
SS 4 : Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang profesioanal dalam mendukung penegakan hukum yang berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak dan klien Pemasarakatan ,	Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah					808.686.000
					Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	1	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	100 %	
						2	Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	100 %	
						3	Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	100 %	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (SK)	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (ISK)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
					Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	1	Persentase anak yang memperoleh nilai baik dengan presikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	100 %	
						2	Persentase Anak yang mendapatkan Remisi		
					Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan Anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai Standar	1	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan ketrampilan dan bersertifikat	75 %	
						2	Persentase Anak yang memperoleh Hak Integrasi	100 %	
						3	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80 %	
						4	Persentase Anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80 %	
SS 5: Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang aman dan tertib	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	1	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80 %	35.394.000
						2	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70 %	
						3	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80 %	
						4	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca	70 %	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (SK)	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (ISK)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
							gangguan kamtib secara tuntas		
SS 8: Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Program Dukungan Manajemen			Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya UPT Pemasarakatan	Meningkatnya dukungan layanan manajemen Satker	1	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	4.374.748.000
						2	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan	1 Layanan	
						3	Tersedianya data dan peningkatan kompetensi pegawai Pemasarakatan	1 Layanan	
						4	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	
						5	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	
						6	Jumlah kendaraan bermotor	1 Layanan	
						7	Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	1 Layanan	
						8	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	1 Layanan	
						9	Jumlah gedung dan bangunan	1 Layanan	

Tabel IV. Sasaran Program/Kegiatan Kinerja

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu strategis dalam lingkup kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Pangkalpinang, yaitu :

1. Belum selarasnya indikator/ukuran keberhasilan dalam Renstra Kementerian/Lembaga dengan indikator kinerja Sekretariat Jendral agar memenuhi kriteria *Specific, Measureable, Achievable, Relevant, Timebond* (SMART) dan Cukup;
2. Dalam penyusunan perencanaan tahun yang akan datang, terdapat kebijakan dan prioritas baru yang berbeda dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Sehingga hasil evaluasi belum dapat direalisasikan sepenuhnya dalam penyusunan perencanaan tahun mendatang;
3. Kebutuhan BMN yang belum memenuhi standar kebutuhan
4. Terdapat BMN yang dalam kondisi rusak berat yang belum dilakukan penghapusan
5. Belum adanya aturan yang baku terkait pengelolaan kehumasan yang terpadu.
6. Penetapan standarisasi layanan keprotokolan dan pengamanan guna keseragaman pelaksanaan dan kejelasan tugas fungsi setiap petugas protokol di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang.
7. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang belum mempunyai Ruang Sentral Arsip.
8. Ketersediaan lokasi untuk kegiatan keterampilan dan rekreasi Anak Binaan yang tidak memadai

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2022 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) di Lingkungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai berikut :

KATA PENGANTAR	Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2021.
IKHTISAR EKSEKUTIF	Menyajikan ringkasan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2021.
BAB I	PENDAHULUAN Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran umum struktur organisasi, sumber daya manusia dan sistematika penulisan.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021, meliputi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA Menguraikan analisis pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.
BAB IV	PENUTUP Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2021 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

a. Visi, Misi dan Tujuan

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJM Nasional). Renstra merupakan platform Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM atas pelaksanaan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya dan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024. Pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Sekretariat Jenderal adalah untuk mencapai Visi Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa Visi Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM

tahun 2020-2024 adalah:

***“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

b. Misi

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang sebagai supporting unit bagi Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab mensukseskan misi Kementerian Hukum dan HAM tersebut. Hal tersebut diterjemahkan ke dalam Misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas. Bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM (Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang) yang Prima.
2. Mendukung penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya. Bertujuan untuk memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan.
3. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Pemasyarakatan. Bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan
4. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan. Bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

B. Perjanjian Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dengan Perjanjian Kinerja menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan SAKIP.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Penyusunan Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RKA-KL yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target kinerja yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Spesifik (*specific*);
2. Dapat terukur (*measurable*);
3. Dapat tercapai (*attainable*);
4. Berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan
5. Dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

Tujuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja, dengan demikian Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut diuraikan target kinerja Tahun 2022 sesuai dengan indikator setiap sasaran kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	75

Adapun Target Kinerja masing – masing kegiatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II pangkalpinang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	278.896.000
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%	
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%	494.396.000
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	
		3. persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%	
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	35.394.000
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasaryakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	4.374.748.000
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasaryakatan	1 Layanan	
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 808.686.000
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 808.686.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.374.748.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 4.374.748.000

Tabel II. Perjanjian Kinerja

Pencapaian Indikator Kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik, terarah dan terencana jika dilakukan dengan kegiatan secara berkesinambungan dan sinergis dengan Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM “PASTI” (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) dan *core value* ASN “BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) yaitu :

1. Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM;
2. Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM;
3. Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM;
4. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Program dan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja;
5. Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan HAM.
6. Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan HAM;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja menurut realisasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L), Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang melaksanakan Program Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah & Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 5.183.434.000** (*lima miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) untuk mencapai target yang telah ditetapkan terhadap indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2022 dan dilakukan pengukuran atau evaluasi secara berkala dalam aplikasi *E-performance*.

NO	INDIKATOR	SASARAN	REALISASI	PERSENTASE	REMARKS
1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang	100%	100%	100%	Indikator Kinerja Utama (IKU) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang telah tercapai dengan nilai 100%.
2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang	100%	100%	100%	Indikator Kinerja Utama (IKU) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang telah tercapai dengan nilai 100%.
3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang	100%	100%	100%	Indikator Kinerja Utama (IKU) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang telah tercapai dengan nilai 100%.
4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang	100%	100%	100%	Indikator Kinerja Utama (IKU) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang telah tercapai dengan nilai 100%.
5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang	100%	100%	100%	Indikator Kinerja Utama (IKU) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang telah tercapai dengan nilai 100%.

Pencapaian Sasaran Program Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2022 sebagaimana ditetapkan dalam RKA K/L Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya, hal tersebut diuraikan sebagai berikut :

➤ **TABEL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	100%	165.538.783
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	100%	15.815.000
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	0%	-
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	0%	80.857.300
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	0%	-
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	0%	-
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	0%	-
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%	0%	-
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%	100 %	98.911.570
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100 %	10.411.700
		3. persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%	89 %	-
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	88 %	-
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	0 %	-
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	0 %	29.247.700
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	33 %	-
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100 %	-
4.		1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan laporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	4.041.750

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1.060.450
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	40.816.590
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	4.041.750
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	4.176.346.060

Tabel III. Capaian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan Tabel diatas, dari semua Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama yang menjadi Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dapat dijelaskan bahwa terdapat 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama yang Capaian Kinerjanya pada Tahun 2022 mencapai maupun melewati dari target yang telah ditetapkan, pada Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang belum mencapai target yang ditetapkan pada perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sedangkan terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama capaian 0%, hal ini dikarenakan pada indikator tersebut tidak dapat dilaksanakan/direalisasikan di Lpka Kelas II Pangkalpinang pada tahun 2022.

PENJELASAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN

1. Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah

1. Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar
Target 2022 : 75%
Capaian : 100%
Keterangan : Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mendapatkan pelayanan makanan sesuai standart **dibagi** jumlah Tahanan/Narapidana/Anak **dikali** 100% = 260/260 x 100 % = 100 %

2. Indikator Kinerja : Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
Target 2022 : 93%
Capaian : 100%

- Keterangan : Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan preventif secara berkala dan berkualitas **dibagi** jumlah Tahanan/Narapidana/Anak **dikali** $100\% = 260/260 \times 100\% = 100\%$
3. Indikator Kinerja : Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal
 Target 2022 : 96%
 Capaian : 0%
 Keterangan : Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal **dibagi** jumlah Tahanan/Narapidana/Anak perempuan (ibu hamil dan menyusui) **dikali** $100\% = 0/0 \times 100\% = 0\%$ **dibagi** jumlah Tahanan/Narapidana/Anak perempuan (ibu hamil dan menyusui) 2022 **dikali** $100\% = 0/0 \times 100\% = 0\%$
4. Indikator Kinerja : Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
 Target 2022 : 70%
 Capaian : 0%
 Keterangan : Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani **dibagi** jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental **dikali** $100\% = 0/0 \times 100\% = 0\%$
5. Indikator Kinerja : Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
 Target 2022 : 80%
 Capaian : 0%
 Keterangan : Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar **dibagi** jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang lansia **dikali** $100\% = 0/0 \times 100\% = 0\%$
6. Indikator Kinerja : Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
 Target 2022 : 80%
 Capaian : 0%
 Keterangan : Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar **dibagi** jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang berkebutuhan khusus (Disabilitas) **dikali** $100\% = 0/0 \times 100\% = 0\%$

7. Indikator Kinerja : Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
- Target 2022 : 70%
- Capaian : 0%
- Keterangan : Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) **dibagi** jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang menderita penyakit HIV-AIDS dan TB Positif **dikali** $100\% = 0/0 \times 100\% = 0\%$
8. Indikator Kinerja : Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
- Target 2022 : 25%
- Capaian : 0%
- Keterangan : Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika **dibagi** jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengikuti program Rehabilitasi Narkoba **dikali** $100\% = 0/0 \times 100\% = 0\%$ **Keterangan** : di LPKA Kelas II Pangkalpinang tidak ada program rehabilitasi bagi Anak Binaan pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

2. Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar

1. Indikator Kinerja : Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat
- Target 2022 : 75%
- Capaian : 100%
- Keterangan : Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat dibagi jumlah Tahanan/Narapidana/Anak selama tahun 2022 dikali $100\% = 64/64 \times 100\% = 100\%$.
2. Indikator Kinerja : Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi
- Target 2022 : 100%
- Capaian : 100%
- Keterangan : Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang memperoleh Hak Integrasi dibagi jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang akan memperoleh hak integrasi dikali $100\% = 16/16 \times 100\% = 100\%$. Keterangan : Anak binaan yang telah memenuhi syarat akan diajukan integrasi

3. Indikator Kinerja : persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar
 Target 2022 : 80%
 Capaian : 89%
 Keterangan : Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang memperoleh Hak pengasuhan sesuai standar dibagi jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang akan memperoleh Hak pengasuhan sesuai standar dikali 100% = $232/260 \times 100\% = 89\%$. Keterangan :Tahanan yang masih berada di kepolisian tidak menerima hak pengasuhan
4. Indikator Kinerja : Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal
 Target 2022 : 80%
 Capaian : 88%
 Keterangan : Jumlah anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal dibagi jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang akan memperoleh pendidikan formal dan non formal dikali 100% = $230/260 \times 100\% = 88\%$. Keterangan : Tahanan yang masih berada di kepolisian tidak mengikuti pendidikan formal dan non formal

3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

1. Indikator Kinerja : Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
 Target 2022 : 80%
 Capaian : 0%
 Keterangan : Jumlah pengaduan yang diselesaikan dibagi Jumlah pengaduan yang masuk dikali 100%, Ket : $0/9 \times 100\% = 0\%$. Jumlah 0 yang dimaksud dikarenakan tidak adanya pengaduan yang diterima selama tahun 2022
2. Indikator Kinerja : Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
 Target 2022 : 70%
 Capaian : 0%
 Keterangan : Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi dikali 100%. Ket : $0/9 \times 100\% = 0\%$
3. Indikator Kinerja : Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib
 Target 2022 : 80%

- Capaian : 33%
- Keterangan : Jumlah tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibagi jumlah pelaku gangguan kamtib dikali 100% - Ket : $3/9 \times 100\%=33\%$
4. Indikator Kinerja : Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
- Target 2022 : 70%
- Capaian : 100%
- Keterangan : Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dibagi jumlah gangguan kamtib dikali 100%, Ket : $9/9 \times 100\%=100\%$

4. Meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker

1. Indikator Kinerja : Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
- Target 2022 : 1 Layanan
- Capaian : 1 Layanan
- Keterangan : Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang akuntabel tepat waktu
2. Indikator Kinerja : Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan
- Target 2022 : 1 Layanan
- Capaian : 1 Layanan
- Keterangan : Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan
3. Indikator Kinerja : Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan
- Target 2022 : 1 Layanan
- Capaian : 1 Layanan
- Keterangan : Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan
4. Indikator Kinerja : Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
- Target 2022 : 1 Layanan
- Capaian : 1 Layanan
- Keterangan : Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

5. Indikator Kinerja : Jumlah Layanan Perkantoran
 Target 2022 : 1 Layanan
 Capaian : 1 Layanan
 Keterangan : Terlaksananya Layanan Perkantoran

B. Realisasi Anggaran

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja. Akuntabilitas keuangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 (Desember 2022) diuraikan sebagai berikut :

KODE	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA	REALISASI %
1	2	3	4	5	6
5252.BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	278.896.000	242.005.083	36.890.917	86,77 %
005	Pengadaan Bahan Makanan WBP	278.896.000	242.005.083	36.890.917	86,77 %
5252.BDC.012	Layanan Pendidikan dan Pengentasan Anak	390.779.000	329.515.650	61.263.350	84,32 %
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	390.779.000	329.515.650	61.263.350	84,32 %
5252.BDC.S04	Pelatihan Keterampilan Anak	103.617.000	98.911.570	4.705.430	95,46 %
051	Perencanaan	13.200.000	13.093.470	106.530	99,19 %
052	Pelaksanaan	85.380.000	85.141.850	238.150	99,72 %
053	Evaluasi dan Pelaporan	5.037.000	676.250	4.360.750	13,43 %
5252.BHB.002	Layanan Keamanan dan Ketertiban	35.394.000	29.247.700	6.146.300	82,63 %
051	Penegakan Keamanan dan Ketertiban	24.544.000	24.327.200	216.800	99,12 %
052	Pengawasan	10.850.000	4.920.500	5.929.500	45,35 %
6231.EBA.994	Layanan Perkantoran	4.182.698.000	4.176.346.060	6.351.940	99,85 %
001	Gaji dan Tunjangan	3.350.850.000	3.350.221.912	628.088	99,98 %
002	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	831.848.000	826.124.148	5.723.852	99,31 %

6231.EBA.9 56	Layanan BMN	17.450.000	9.220.450	8.229.550	52,84 %
051	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	9.290.000	1.060.450	8.229.550	11,41 %
052	Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000	8.160.000	0	100 %
6231.EBA.9 58	Layanan Hubungan Masyarakat	20.420.000	18.851.180	1.568.820	92,32 %
051	Penyediaan Informasi Publik	9.450.000	8.422.650	1.027.350	89,13 %
052	Kerja Sama	10.970.000	10.428.530	541.470	95,06 %
6231.EBA.9 62	Layanan Umum	21.320.000	15.639.625	5.480.375	74,05 %
051	Urusan Umum	21.120.000	15.639.625	5.480.375	74,05 %
052	Fasilitasi Kerja New Normal	200.000	0	200.000	0 %
6231.EBB.9 51	Layanan Sarana Internal	57.050.000	56.761.543	288.457	99,49 %
051	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	45.080.000	45.051.043	28.957	99,94 %
053	Peralatan Fasilitas Perkantoran	11.970.000	11.710.500	259.500	97,83 %
6231.EBC.9 54	Layanan Manajemen SDM	45.360.000	40.816.590	4.543.410	89,98 %
051	Pembinaan Pegawai	45.360.000	40.816.590	4.543.410	89,98 %
6231.EBD.9 52	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7.350.000	4.041.750	3.308.250	54,99 %
051	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	7.350.000	4.041.750	3.308.250	54,99 %
6231.EBD.9 53	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	8.100.000	2.855.500	5.244.500	35,25 %
051	Penyusunan Laporan Kinerja	8.100.000	2.855.500	5.244.500	35,25 %
6231.EBD.9 55	Layanan Manajemen Keuangan	8.100.000	5.590.500	2.509.500	69,02 %
051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	8.100.000	5.590.500	2.509.500	69,02 %
6231.EBD.9 61	Layanan Reformasi Kinerja	6.900.000	2.071.200	4.828.800	30,02 %
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	6.900.000	2.071.200	4.828.800	30,02 %
JUMLAH		5.183.434.000	5.031.874.401	151.559.599	97,08 %

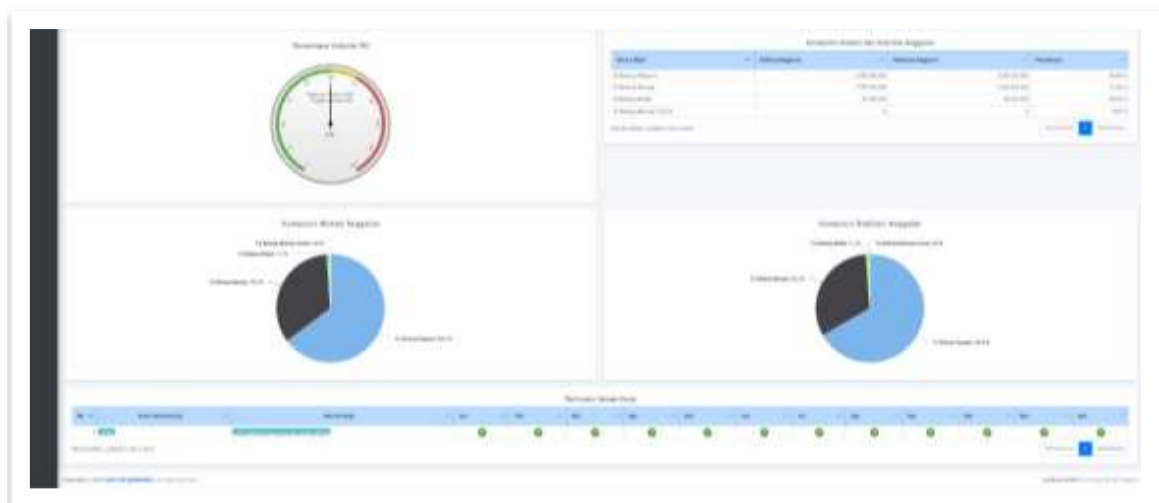
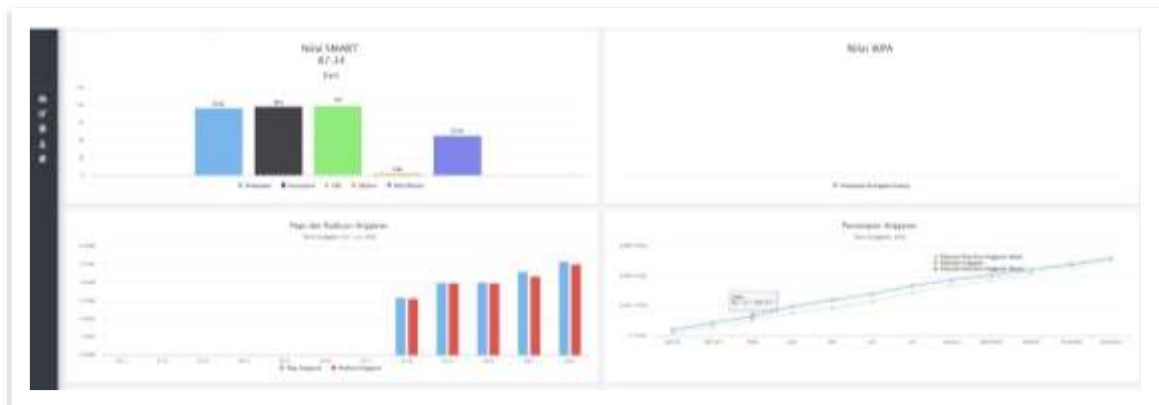
Tabel IV. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Realisasi Anggaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Pangkalpinang yang dapat terserap dengan maksimal per Desember 2022 pada Tahun Anggaran 2022 dari Pagu Rupiah Murni : **Rp 5.183.434.000,-** Realisasi : **Rp 5.031.874.401,-**. Persentase Realisasi **97,08%**.

C. Capaian Kinerja Anggaran

1) Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun oleh Kementerian Keuangan RI guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Dalam rangka meningkatkan Kualitas/mutu pelaporan data kinerja anggaran yang update/sesuai dilingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang serta dalam rangka terwujudnya integrasi data pelaporan sehingga memberikan kemudahan dalam mengakses data dengan cepat, tepat dan akurat serta sesuai dengan kondisi di lapangan.



No	Kode Satker	Uraian Satker	Indikator Penilaian (%)					Nilai Total	Keterangan
			Penyerapan	Konsistensi	Capaian Rincian Output (CRO)	Efisiensi	Nilai Efisiensi		
1	352605	LPKA Pangkal Pinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung	97,02	98,9	100	2,98	57,44	87,34	Baik

2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga. Penilaian IKPA tahun anggaran 2022 berubah dari 13 indikator menjadi 8 indikator, meliputi : Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output.

No	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
			Revisi DIPA	Deviasi Halangan III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output				
1	LPKA Pangkal Pinang,	Nilai	100	85,45	100	100	100	98,51	100	100	98,4	100%	98,4	
		Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25				
		Nilai Akhir	10	8,55	20	10	10	9,85	5	25				
		Nilai Aspek	92,73		99,7					100				

D. Capaian Kinerja lainnya

1) E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

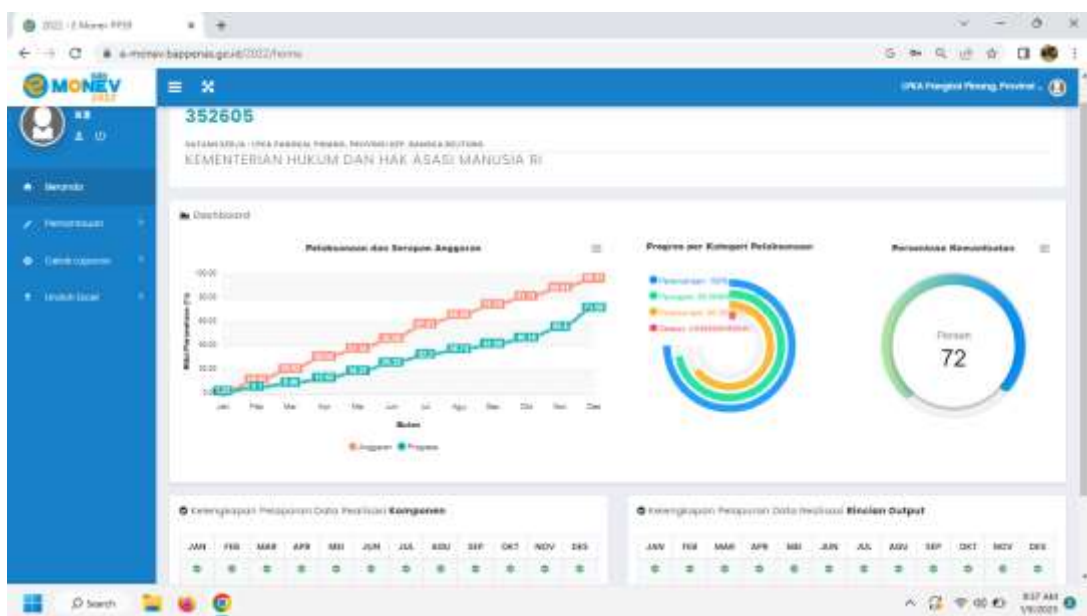
E-performance Kementerian dan Hak Asasi Manusia sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja,

penganggaran kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian dan keuangan. Aplikasi E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diakses melalui laman : <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Pelaporan Kinerja melalui aplikasi E-performance Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan setiap bulan paling lambat 10 bulan berikutnya.

The screenshot shows the 'DATA PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA' (Performance Commitment and Realization Data) page. It features a search bar for 'TAHUN' (Year) and 'UNIT KERJA' (Work Unit). Below the search bar is a table with columns for 'NO', 'KETERANGAN', 'INDIKATOR', 'SATUAN', 'KUALITAS', 'KANTOR', 'INDIKATOR/INDIKATOR', 'JANGKA WAKTU', 'SALINAN', 'JENJANG', 'KETERANGAN', 'LEMBAGA', and 'KEMENTERIAN'. The table contains several rows of data, including indicators like 'Meningkatkan Penguasaan Kemampuan Pemahaman dan Penalaran Logis Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita' and 'Meningkatkan Keterampilan Berbahasa Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita'.

2) E-Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev Bappenas merupakan salah satu instrumen pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi hasil pemantauan (data realisasi) pelaksanaan rencana pembangunan satker kementerian/lembaga.



BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja Tahun 2021 merupakan wujud sinergi seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam menghadapi berbagai tantangan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh stakeholders dan mampu memberikan informasi yang relevan tentang kinerja Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan disusunnya laporan ini diharapkan juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM di tahun yang akan datang.

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program yang dilaksanakan;
2. Pada tahun 2022, target dalam Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja sudah tercapai dengan baik meskipun masih terdapat target yang belum tercapai serta terdapat capaian lainnya;
3. Anggaran Tahun 2022 sebesar **Rp 5.183.434.000,-** Realisasi : **Rp 5.031.874.401,-**,
Persentase Realisasi **97,08%**;
4. Dalam pelaksanaan kegiatan telah menerapkan prinsip akuntabel, efektif dan efisien atas pemanfaatan sumber daya.

B. Saran

Upaya pemecahan masalah atau kendala yang dihadapi perlu dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang. Berikut beberapa saran untuk meningkatkan kinerja instansi kedepannya:

1. Memanfaatkan data yang disajikan dalam laporan kinerja dan hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan, maupun dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, perbaikan pengelolaan program dan kegiatan, serta peningkatan kinerja;

2. Meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kerja, Kementerian Keuangan dan mitra kerja lainnya terkait Pelaksanaan Anggaran;
3. Meningkatkan koordinasi antara Humas Unit Pusat dan Kantor Wilayah dalam penguatan Kehumasan serta Humas Kementerian/Lembaga dalam penyebaran informasi;
4. Perlu pelatihan khusus atau diklat terutama masalah tatacara pelaporan (LKjIP, Lapbul, SPIP, Laporan Tahunan);
5. Untuk mendapatkan data capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan secara terstruktur mulai dari jajaran atas sampai jajaran bawah rangka melaksanakan kegiatan operasional kantor;
6. Memperkuat fungsi koordinasi dengan instansi penegak hukum terkait;
7. Menguatkan fungsi pengawasan internal pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang;
8. Beberapa target dari sasaran yang ditetapkan masih perlu di optimalkan lagi mengenai kegiatan dan penganggarannya.



Pangkalpinang, 09 Januari 2022

KEPALA



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SOLIHIN

NIP. 19650416 199003 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nanang Rukmana
Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anas Saeful Anwar
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Bangka Belitung


Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Pangkalpinang


Nanang Rukmana
NIP. 197202111996031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	75

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	1. Indeks Pembinaan Khusus Anak	68
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	75

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib		

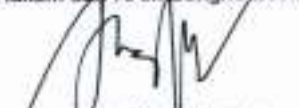
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar 2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 5. Persentase tahanan/harapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6. Persentase tahanan/harapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	75% 93% 96% 70% 80% 80% 70% 25%
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat 2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi 3. persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar 4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	75% 100% 80% 80%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh	80% 70% 80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 821.576.000
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 821.576.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.267.698.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 4.267.698.000

Pangkalpinang, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Bangka Belitung



Anas Saefi Anwar
NIP. 196202191986031002

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Pangkalpinang



Nanang Rukmana
NIP. 197202111995031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nanang Rukmana
Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangkalpinang, 03 Januari 2022

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Pangkalpinang

Nanang Rukmana
NIP. 197202111995031001

SURVEI IKM BULAN DESEMBER 2022



LAMPIRAN TABEL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak	Persentase Anak yang Melanjutkan Pendidikan	60%	100%
		Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	70%	89.83%
		Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	100%
		Persentase Anak yang Memperoleh Hak Remisi	100%	100%
		Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	70%	100%
		Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	70%	100%
2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	0%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	0%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	16.70%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	100%
3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	100 %
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	100%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	0%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	0%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	0%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	0%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	0%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	0%
		4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan			1 Layanan
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan			1 Layanan
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan			1 Layanan
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan			1 Layanan

Tabel V. Capaian Kinerja Tahun 2021